BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta pasti memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba. Dalam proses untuk mendapatkan laba pasti membutuhkan beberapa unsur, mulai dari modal yang memadai, sumber daya manusia yang mendukung, target penjualan yang terarah dan fasilitas kantor yang memadai. Fasilitas kantor merupakan sesuatu yang terdapat di perusahaan yang bisa dinikmati dan ditempati karyawan secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang kelancaraan kerja karyawan (Simbolon, 2020). Fasilitas kantor tergolong ke dalam aset tetap meliputi kendaraan, laptop, gedung, mesin dan lain lain. Menurut (Dunia & Abdullah, 2009) peran dari aset tetap yaitu menghasilkan produksi dan menunjang operasional agar mendapatkan laba yang maksimal. Oleh karenanya perusahaan biasanya menginvestasikan labanya ke aset tetap untuk menunjang operasional dan meningkatkan produksi.

Investasi ke aset tetap yang dilakukan perusahaan pastinya harus dihitung dan dicatat secara tepat baik sesuai aturan internal maupun standar akuntansi. Peran akuntansi didalam perusahaan yaitu memberikan gambaran keuangan perusahaan dengan membuat laporan keuangan yang relevan (Trio Mandala Putra et al., 2013). Laporan keuangan tersebut dapat

menjadi bahan penilaian dan evaluasi suatu perusahaan untuk seluruh pemangku kepentingan baik *internal* maupun *eksternal*.

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi berlaku, standar yang berlaku contohnya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK sendiri ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pihak pengguna PSAK dijelaskan dalam PSAK 1 paragraf 5 "Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik" (IAI, 2022). Dengan kata lain PSAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di pasar modal (Mekariconference, 2022). Oleh karena itu Kementrian BUMN menetapkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mengimplementasikan *konvergensi International Financial Reporting Standards* (IFRS) secara penuh mulai tahun buku 2012 (Pradana & Herawati, n.d.). Tujuan konvergensi IFRS adalah untuk menyamakan perbedaan Dalam SAK indonesia dengan IFRS yang bersifat *principle based accounting standard*. Artinya pengguna PSAK memerlukan pertimbangan profesional dan kompetensi. Selain itu, dalam sisi pelaporan lebih mudah untuk dipahami karena berbasis aturan.

Salah satu PSAK yang telah sesuai dengan IFRS adalah PSAK No 16 yang mengatur mengenai aset tetap. Pengaturan aset tetap dilakukan agar suatu aset tetap dapat diakui, diukur, dihentikan, dan diungkapkan sesuai

dengan standar yang berlaku. Apabila ingin membeli atau menjual aset tetap harus melakukan perencanaan yang matang karena aset tetap dapat berdampak panjang sehingga mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Mayangsari, 2018).

Pencatatan aset tetap dapat dikatakan baik apablila suatu perusahaan mampu menerapkan standar aset tetap yang berlaku yaitu PSAK 16. PSAK 16 mengatur bagaimana perusahaan mengakui pengeluaran perusahaan yang dapat diakui sebagai aset atau biaya. Pengukuran aset tetap juga terdapat dalam aturan PSAK 16, pengukuran yang diatur yaitu pengukuran saat pengakuan dan pengukuran setelah pengakuan. Pengukuran saat pengakuan menjelaskan mengenai elemen apa saja yang dapat diakui sebagi aset. Sedangkan pengukuran setelah pengakuan menjelaskan mengenai revaluasi aset,penyusutan dan penurunan nilai aset tetap, sehingga nantinya berpengaruh pada penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap menjelaskan mengenai bagaimana pencatatan penghentian aset tetap yang berpengaruh nantinya terhadap pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan.

Penulis melakukan wawancara mendalam untuk penggalian masalah penelitian pada PT X. PT X merupakan perusahaan BUMN yang bergerang di bidang konsultan konstruksi dan manajemen. Bidang usaha yang dijalankan PT X adalah *study*, master plan, *design*, supervisi, manajemen konstruksi dan *technical assistance* (PT X, 2022). Dilihat dari bidang usaha yang akan diteliti sangat erat kaitanya dengan aset tetap untuk menunjang

operasional perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti aset tetap PT X dengan mewawancarai beberapa informan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala bagian keuangan dan staf akuntansi PT X terdapat dua permasalahan, pertama mengenai pengukuran aset tetap seperti: laptop, *scanner*, komputer, mesin *fotocopy* dan televisi. Aset tersebut disusutkan terlebih dahulu oleh perusahaan padahal aset tersebut belum digunakan oleh PT X pada Desember 2021 sampai 2022. PT X pada tahun 2021 melakukan pembelian aset inventaris kantor sebesar Rp 4.004.492.792. Sementara aset tetap yang belum digunakan pada tahun berjalan sebesar Rp 1.704.724.307 dari total aset tetap. Pengukuran aset yang dilakukan terlebih dahulu akan berdampak pada beban penyusutan perusahaan yang semakin tinggi akibatnya akan mengurangi laba perusahaan dan kesalahan pada penyajian laporan keuangan.

Permasalahan kedua mengenai revaluasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh PT X. Dimana aset tetap yang sudah direvaluasi tidak dicatat dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan PT X sehingga aset tetap tanah tersebut tidak mencerminkan nilai wajarnya.

Pencatatan aset pada sebuah perusahaan terkadang belum dapat terlaksana dengan baik mulai dari pengakuan aset tetap yang nantinya berpengaruh kepada nilai aset tetap sampai dengan proses pengungkapan pada laporan keuangan. Pencatatan aset tetap yang kurang sesuai dengan PSAK 16 berdampak pada ketidaksesuaian laporan keuangan perusahaan

sehingga nilai aset tetap bernilai lebih rendah atau lebih tinggi dari pada keadaan yang sebenarnya dan terjadi kesalahan informasi mengenai pengakuan aset pada perusahaan (Hariyanto et al., 2020).

Penulis juga mengambil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan aset tetap yaitu penelitian dari Anisa Putri Mayangsari dan Yayuk Nurjanah tahun 2018 dengan judul "Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus pada CV.Bangun Perkasa Furniture". Anisa dan Yayuk mengunngkapkan bahwa aset tetap pada CV Bangung Perkasa Furniture tidak sesuai dengan PSAK 16. Ketidak sesuaian terdapat pada pengungkapan karena CV Bangun Perkasa Furniture tidak memiliki catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di PT X terhadap penerapan PSAK 16. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 Pada PT X"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlakuan akuntansi aset tetap PT X?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap PT X

b) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16

2. Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai PSAK No 16 tentang aset tetap mengenai pengakuan, pengukuran, pelepasan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Sehingga menunjang untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan.

b) Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi PT X mengenai pengakuan, pengukuran, pelepasan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan tentang aset tetap yang terjadi pada PT X. Sehingga PT X dapat menerapkan PSAK No 16 sesuai peraturan yang berlaku.